

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah otonomi yang luas sebagai salah satu bentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Tetapi dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menghadapi berbagai kendala, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan desentralisasi.

Otonomi yang luas diberikan kepada daerah-daerah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta peran masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah terdapat beberapa kendala, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sangat memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang harus memadai untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. Adanya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Sumber-sumber penerimaan lainnya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada penyesuaian terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (Rahardjo, 2011: 2).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan lebih optimal lagi untuk mewujudkan kemandirian lokal. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, tapi diharapkan setiap daerah untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki ditingkatkan secara intensif. Peningkatan penerimaan daerah tersebut akan meningkatkan APBD daerah yang bersangkutan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan penerimaan suatu daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. APBD merupakan suatu rencana operasional keuangan suatu daerah yang menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Dilihat dari konteks pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan daerah dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat

terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi suatu daerah, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah suatu daerah harus dikelola secara efektif, efisien, profesional dan berkelanjutan (Rahardjo, 2011: 3).

Pengelolaan keuangan daerah dapat disusun dalam bentuk laporan kinerja keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (LAKIP Kabupaten Bangka Selatan, 2016: 1).

Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan suatu daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Sudaryo, 2017: 9).

Pemerintah daerah yang berperan sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan

daerah sebagai penilaian berhasil atau tidaknya daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Program atau kegiatan yang diusulkan merupakan usulan program atau kegiatan yang mempunyai kaitan logis dengan strategi dan prioritas APBD. Sejauhmana kontribusi dari kinerja program atau kegiatan yang diusulkan terhadap implementasi strategi prioritas APBD dalam rangka pencapaian arah dan kebijakan umum APBD merupakan dasar penilaian kewajiban beban kerja (Rahardjo, 2011: 76).

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dapat dihitung dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pencapaian pendapatan dari periode ke periode selanjutnya. Adapun rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi. Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah bergantung pada pendapatan yang diterima dari pendapatan transfer. Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewenangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian yang terjadi. Untuk memudahkan analisis digunakan pertumbuhan ekonomi tanpa migas, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi yang berhasil diciptakan sebesar 5,26 persen kemudian pertumbuhan ekonomi Bangka Selatan mengalami penurunan atau melambat pada tahun 2013 dan pada tahun 2014-2016 pertumbuhan perekonomian mengalami peningkatan tetapi tidak terlalu besar.

Tabel I.1 Kontribusi Pendapatan Daerah Pemkab Bangka Selatan

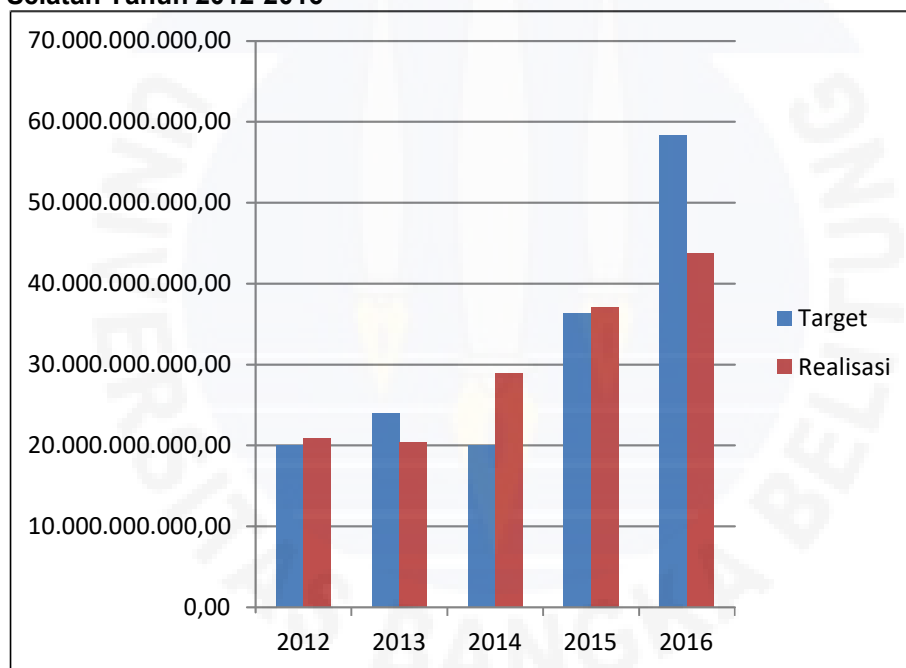
Realisasi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kontribusi PAD (%)	3,94	3,61	4,40	4,94	6,01
Kontribusi Dana Perimbangan (%)	91,14	86,70	92,40	93,08	89,71
Lain – lain Pendapatan Yang Sah (%)	4,92	9,69	3,20	1,98	4,27
Total	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017

Sejak terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan, kontribusi terbesar pada jumlah Pendapatan daerah masih tetap didominasi oleh komponen Dana Perimbangan. Tahun 2016 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 89,71% terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan. Komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) kontribusinya tahun 2016 sebesar 6,01% meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah kontribusinya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2012 kontribusinya hanya sebesar 4,92% mengalami peningkatan yang tinggi sebesar 9,69% pada tahun 2013, pada tahun 2014, 2015 dan 2016 kontribusinya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar 4,27% terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Bangka Selatan Tahun 2017

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan 2012 - 2016

No	Tahun	Keterangan	
		Target	Realisasi
1	2012	20.018.802.463,00	20.861.848.761,57
2	2013	24.050.032.653,00	20.419.445.984,62
3	2014	20.106.976.434,00	28.907.044.191,72
4	2015	36.363.309.469,00	37.066.252.156,88

5	2016	58.344.896.378,00	43.715.959.380,75
---	------	-------------------	-------------------

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Bangka Selatan Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir penerimaan Pendapatan Asli Daerah daerah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2012, 2014 dan 2015 tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan namun peningkatannya tidak terlalu tinggi kecuali pada tahun 2014, pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat tinggi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2016 dan 2013 Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa komponen sumber PAD yang selama tahun anggaran 2012-2016 mengalami fluktuasi yang mengakibatkan PAD pada tahun anggaran 2013 dan 2016 realisasi PAD Kabupaten Selatan mengalami penurunan.

Selain penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah setiap pemerintah daerah juga memiliki penerimaan pendapatan yang berasal dari transfer pusat maupun transfer provinsi. Pemerintah kabupaten bangka selatan dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek pembangunan daerah masih sangat ketergantungan terhadap pendapatan transfer yang diperoleh dari baik transfer pusat maupun transfer provinsi.

Tabel I.3 Pendapatan Transfer Daerah Pemkab Bangka Selatan

Tahun Anggaran	Total Pendapatan Transfer	Transfer Pusat	Transfer Provinsi
2012	479.770.938.468,00	445.925.879.468,00	19.755.544.000,00

2013	504.277.325.984,00	488.507.714.984,00	15.769.611.000,00
2014	584.048.152.907,00	552.522.072.907,00	21.003.813.900,00
2015	637.047.865.978,00	617.820.840.978,00	19.227.025.000,00
2016	711.781.004.965,00	684.819.924.965,00	26.961.080.000,00

Sumber: Data Diolah Peneliti 2018

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa penerimaan pendapatan transfer daerah Kabupaten Bangka Selatan sangat tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan masih sangat ketergantungan kepada pemerintah pusat/provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum mampu melaksanakan desentralisasi daerah.

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016 secara umum cenderung mengalami peningkatan. Pendapatan daerah Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan yang sah relatif masih kecil terhadap seluruh total pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah Dan Pendatan Transfer Pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012-2016”. Analisis kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam bidang keuangan periode 2012-2016 yang di ukur menggunakan Rasio keuangan daerah. Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Bangka Selatan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diangkat. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja PAD Kabupaten Bangka Selatan yang di ukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2012-2016??
2. Bagaimana kinerja PAD Kabupaten Bangka Selatan yang di ukur melalui rasio efektivitas selama periode 2012-2016?
3. Bagaimana kinerja Pendapatan Transfer pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diukur melalui rasio ketergantungan keuangan daerah selama periode 2012-2016?
4. Bagaimana kinerja keuangan daerah melalui pendapatan transfer pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diukur melalui rasio derajat denetralisasi selama periode 2012-2016?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang akan diteliti, dibatasi penyajian hanya pada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan Periode 2012-2016 yang diukur

menggunakan analisis rasio keuangan daerah, antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi. Adapun objek penelitiannya adalah Laporan target dan realisasi penerimaan daerah tahun 2012-2016 yang terdapat di kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Bangka Selatan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Ppendapatan Asli Daerah pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di ukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah selama periode 2012-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bangka Selatan di ukur dengan rasio efektivitas selama periode 2012-2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendapatan Transfer yang di ukur dengan rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Bangka Selatan selama periode 2012-2016.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendapatan Trasnfer pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diukur melalui rasio derajat desentralisasi selama periode 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan lain, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah ;

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Kinerja Keuangan Suatu Pemerintahan yang Diukur dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

3. Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah di Kabupaten Bangka Selatan sebagai salah satu dasar untuk mengambil sebuah kebijakan yang sistematis sehubungan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan landasan teori mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan, serta landasan teori berkaitan dengan permasalahan yang diambil yaitu teori yang berhubungan dengan Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Selain dari landasan teori tersebut, juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Mendeskripsikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data dan teknik pengambilan sampel, variabel yang diteliti, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis dari Penelitian disertai pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta keterbatasan penelitian.

